

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi tidak saja menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai diskusi publik, melainkan sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian besar negara. Proses interaksi, pengaruh-mempengaruhi, bahkan pergesekan kepentingan antar bangsa terjadi dengan cepat dan mencakup masalah yang semakin kompleks. Batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi penghalang bagi upaya pemenuhan kebutuhan tiap-tiap negara di semua bidang. Dalam menghadapi globalisasi, ketahanan ekonomi nasional merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Indonesia memiliki tiga sektor pelaksana kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan koperasi. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, maka ketiga sektor tersebut haruslah saling bekerjasama dengan baik. Berdasarkan ketiga sektor tersebut, koperasi dianggap yang paling cocok dikembangkan di Indonesia. Koperasi dibentuk oleh anggota dan hasilnya digunakan kembali untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada dasarnya ialah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi ekonomi rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dimana kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama bukan kemakmuran orang per orang.¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tersebut menjelaskan bahwa usaha-usaha ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan tersebut. Koperasi diharapkan menjadi organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi rakyat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggota dan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya koperasi belum menjadi pilihan utama bagi perekonomian di masyarakat.

Koperasi dianggap belum mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan, bahkan semakin banyak koperasi yang mati suri. Pada tahun 2014 sebanyak 40% koperasi yang ada di Indonesia dinyatakan tidak beroperasi

¹Departemen Keuangan RI, "Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", <http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm> (diakses 05 Juni 2015).

secara produktif.² Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, per 31 Desember 2014 jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 209.488. Sebanyak 147.249 koperasi telah beroperasi aktif, sementara sisanya yakni 62.239 dinyatakan tidak aktif.

Koperasi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain pun masih jauh tertinggal. Diumumkan secara resmi pada tanggal 5 Nopember 2013 di Capetown, Afrika Selatan bahwa Indonesia hanya mampu menyumbang satu koperasi dalam deretan koperasi elit dunia yang berjumlah 300. Koperasi tersebut yakni Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) yang berada pada peringkat 233.³ Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia.

Di seluruh dunia koperasi maju kecuali di Indonesia, 300 koperasi kelas dunia (disusun ICA) memiliki jaringan internasional yang sangat luas dengan modal dan omzet ratusan miliar US dollar.⁴ Koperasi-koperasi tersebut umumnya tidak mendapat bantuan atau subsidi pemerintah. Sedangkan koperasi di Indonesia memiliki landasan yuridis-konstitusional sebagai sistem ekonomi mikro maupun makro, memiliki Undang-Undang Perkoperasian, dibina Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta mendapat subsidi cukup besar melalui APBN namun omzetnya masih jauh berada di level bawah. Hal ini juga dapat terlihat dari perolehan

²Sepudin Zuhri, Kementerian Koperasi dan UKM, "40% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif", 01 Desember 2014, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:ternyata-40-koperasi-di-indonesia-tidak-aktif&catid=50:bind-berita&Itemid=97 (diakses 05 Januari 2015).

³Hanni Sofia, Antara News, "Kemenkop rilis 100 koperasi siap go internasional", 28 Agustus 2014, <http://www.antaraneews.com/berita/450749/kemenkop-rilis-100-koperasi-siap-go-internasional> (diakses 05 Juni 2015).

⁴Sri Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 7.

sisa hasil usaha (SHU) koperasi di seluruh provinsi Indonesia yang persentase kenaikannya terus mengalami penurunan. Sisa hasil usaha (SHU) tersebut terdiri dari gabungan koperasi semua provinsi yang terdiri dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia salah satunya Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Turunnya nilai sisa hasil usaha pun dirasakan salah satu koperasi di Pulau Sumatera yaitu Koperasi Sawitra. Menurut ketua koperasi Bapak Herry, penurunan SHU di tahun 2014 mencapai Rp663.646.457.⁵ Selain itu, sisa hasil usaha Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) Beringin Kecamatan Payakumbuh Timur juga turun dari SHU tahun sebelumnya yaitu sekitar 8,04 persen.⁶ Pada tahun 2014 Pulau Sumatera memiliki jumlah koperasi sebanyak 46.187 unit yang tersebar di sepuluh provinsi. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel I.1

Sisa Hasil Usaha (dalam juta rupiah)

Provinsi	Tahun	SHU	Provinsi	Tahun	SHU
N. Aceh Darussalam	2010	33.988,10	Sumatera Selatan	2010	106.154,30
	2011	73.299,10		2011	117.053,00
	2012	41.242,16		2012	117.053,00
	2013	116.858,58		2013	129.583,59
	2014	646.237,69		2014	344.044,12

⁵ Rudy, Pijar Riau, "Koperasi Unit Desa "Sawitra" Gelar Rapat Anggota Tahunan", 15 Februari 2015, <http://pijarriau.com/news/detail/543/koperasi-unit-desa-%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C-gelar-rapat-anggota-tahunan.html> (diakses pada 17 Februari 2015).

⁶ Joko Nugroho, "Antara News, "SHU KP RI Beringin Capai Rp124 juta", 1 Februari 2014, <http://sumbar.antaraneews.com/berita/82148/shu-kp-ri-beringin-capai-rp124-juta.html> (diakses pada 17 Februari 2015).

Sumatera Utara	2010	266.586,77	Bengkulu	2010	71.209,96
	2011	302.034,96		2011	70.616,15
	2012	302.034,96		2012	61.033,23
	2013	373.120,63		2013	142.796,53
	2014	500.512,93		2014	73.262,84
Sumatera Barat	2010	125.022,69	Lampung	2010	72.511,00
	2011	129.544,60		2011	287.648,62
	2012	159.498,90		2012	287.648,62
	2013	285.573,36		2013	82.193,00
	2014	190.215,29		2014	386.044,30
Riau	2010	95.569,93	Bangka Belitung	2010	27.919,80
	2011	152.460,00		2011	34.562,73
	2012	119.790,73		2012	121.861,83
	2013	160.172,41		2013	259.152,79
	2014	177.527,78		2014	226.125,13
Jambi	2010	44.509,55	Kepulauan Riau	2010	10.993,00
	2011	41.665,72		2011	13.011,00
	2012	54.216,98		2012	13.011,00
	2013	51.204,51		2013	30.169,00
	2014	104.710,28		2014	64.175,00

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2015

Berdasarkan tabel I.1 terlihat bahwa sisa hasil usaha (SHU) koperasi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera dengan rentan waktu tahun 2010-2014 mengalami penurunan di tujuh provinsi yaitu provinsi N. Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tiga provinsi sisanya yakni provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau tidak mengalami penurunan sisa hasil usaha (SHU). Provinsi yang paling sering mengalami penurunan sisa hasil usaha (SHU) yaitu provinsi Bengkulu.

Sisa hasil usaha merupakan salah satu pencapaian koperasi dalam menjalankan usahanya. Perkembangan nilai sisa hasil usaha tersebut dapat mencerminkan bahwa koperasi telah dikelola secara profesional atau belum. Koperasi yang dikelola secara profesional dan mampu memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya manusia dengan baik, akan berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁷ Koperasi dapat berfungsi sebagai sistem perekonomian bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurunnya sisa hasil usaha (SHU) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sedikitnya jumlah anggota, modal usaha yang minim, dan volume usaha yang semakin menurun di tiap tahunnya.

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Semakin banyak jumlah anggota, akan membuat kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota. Anggota selaku pemilik dan pengguna usaha merupakan penentu keberhasilan koperasi. Namun pada kenyataannya jumlah anggota koperasi hampir di semua provinsi Pulau Sumatera mengalami penurunan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pesisir Selatan pun mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.

⁷Syamsudin Djahmat, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), h. 134.

Penurunan ini terjadi karena anggota keluar lebih banyak dari anggota yang masuk sehingga secara akumulasi terjadi penurunan anggota.⁸ Pada tiap tahunnya lebih banyak provinsi dengan jumlah anggota yang menurun dibandingkan dengan peningkatannya. Data jumlah anggota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Anggota (orang)

Provinsi	Tahun	Jumlah Anggota	Provinsi	Tahun	Jumlah Anggota
N. Aceh Darussalam	2010	528.953	Sumatera Selatan	2010	763.426
	2011	483.814		2011	798.588
	2012	458.913		2012	798.588
	2013	500.956		2013	811.870
	2014	500.202		2014	630.738
Sumatera Utara	2010	2084.117	Bengkulu	2010	158.506
	2011	2085.871		2011	167.260
	2012	1976.709		2012	151.469
	2013	2097.344		2013	180.038
	2014	2116.386		2014	176.640
Sumatera Barat	2010	560.332	Lampung	2010	676.507
	2011	511.022		2011	865.957
	2012	521.621		2012	865.957
	2013	545.288		2013	598.600
	2014	516.139		2014	681.948
Riau	2010	571.602	Bangka Belitung	2010	88.273
	2011	609.876		2011	96.961
	2012	600.404		2012	99.862
	2013	616.833		2013	103.750
	2014	545.025		2014	106.558
Jambi	2010	352.477	Kepulauan Riau	2010	137.327
	2011	345.105		2011	139.953
	2012	355.159		2012	139.953
	2013	361.265		2013	119.403
	2014	367.962		2014	182.449

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2015

⁸Febri, Padang Media, "Jumlah Anggota KP-RI Kantor Bupati Pessel Menurun", 19 Mei 2011, <http://m.padangmedia.com/1-Berita/67812-Jumlah-Anggota-KP-RI-Kantor-Bupati-Pessel-Menurun.html> (diakses pada 17 Februari 2015).

Berdasarkan tabel I.2 dapat terlihat bahwa dalam rentan waktu tahun 2010-2014, jumlah anggota pada hampir semua provinsi mengalami penurunan. Sebanyak sembilan dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan jumlah anggota koperasi. Provinsi yang mengalami penurunan jumlah anggota diantaranya yaitu provinsi N. Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Provinsi yang paling sering mengalami penurunan jumlah anggota koperasi pada rentan tahun 2010-2014 yaitu provinsi N. Aceh Darussalam, sedangkan satu provinsi yang tidak mengalami penurunan jumlah anggota koperasi yaitu provinsi Bangka Belitung. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam usaha koperasi menjadikan koperasi lemah dan koperasi terus dianggap sebelah mata oleh sebagian orang.

Modal merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya selain jumlah anggota, karena tanpa modal sebuah usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan modal usaha dalam koperasi berjalan lambat disebabkan karena kurangnya partisipasi penanaman modal baik dari dalam maupun luar koperasi. Terbatasnya modal usaha yang ada dalam koperasi inilah yang menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha koperasi sehingga akan berakibat pada penurunan sisa hasil usaha (SHU).

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dapat terlihat dari usaha yang dijalankan oleh unit usaha koperasi tersebut. Kegiatan operasional koperasi akan mendatangkan pendapatan pada koperasi, dilihat dari volume usahanya apabila sebuah koperasi ingin meningkatkan pendapatannya sudah selayaknya koperasi lebih mengembangkan usaha disetiap unit-unit usaha yang dijalankan. Apabila terjadi penurunan volume usaha koperasi hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari nilai pendapatan usaha koperasi sehingga akan berdampak terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut.

Pertumbuhan volume usaha setiap tahun diharapkan sebesar 20%, namun realisasinya hanya dua tahun saja volume usaha yang dapat melampaui target tersebut, sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan kembali. Saat ini volume usaha koperasi Indonesia sebesar 13,6% saja, tentu angka tersebut masih jauh dari harapan.⁹ Penurunan volume usaha koperasi juga terjadi pada hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Data volume usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Volume Usaha (dalam juta rupiah)

Provinsi	Tahun	Volume Usaha	Provinsi	Tahun	Volume Usaha
N. Aceh Darussalam	2010	611.010,00	Sumatera Selatan	2010	2.414.546,14
	2011	825.858,00		2011	2.586.985,00
	2012	601.509,68		2012	2.586.985,00
	2013	1.553.971,24		2013	2.688.466,76
	2014	4.559.135,91		2014	2.091.534,43

⁹Pariaman Sinaga, Koran Jakarta, "Harapan Pasa Ekonomi Kerakyatan", 21 Oktober 2014, www.koran-jakarta.com/?22487-harapan%20pada%20ekonomi%20kerakyatan (diakses pada 17 Februari 2015).

Sumatera Utara	2010	3.509.931,55	Bengkulu	2010	1.339.568,83
	2011	3.636.480,63		2011	1.122.303,04
	2012	3.636.480,63		2012	373.622,14
	2013	4.233.117,84		2013	3.141.929,19
	2014	5.048.516,27		2014	2.215.146,49
Sumatera Barat	2010	2.653.902,02	Lampung	2010	1.352.811,00
	2011	3.064.507,14		2011	3.553.294,01
	2012	3.593.274,30		2012	3.533.294,01
	2013	4.000.252,10		2013	2.004.109,00
	2014	4.795.336,35		2014	3.009.000,00
Riau	2010	1.886.977,36	Bangka Belitung	2010	611.210,52
	2011	2.333.364,00		2011	777.613,30
	2012	2.061.761,43		2012	1.354.020,36
	2013	3.098.145,48		2013	2.879.475,42
	2014	2.716.337,09		2014	2.261.251,29
Jambi	2010	1.024.406,53	Kepulauan Riau	2010	69.222,00
	2011	921.348,80		2011	89.071,00
	2012	1.741.171,13		2012	89.071,00
	2013	2.764.950,19		2013	78.267,00
	2014	1.636.743,61		2014	92.725,00

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2015

Berdasarkan tabel I.3 dapat terlihat bahwa volume usaha pada rentan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan di sembilan provinsi, yaitu provinsi N. Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Sedangkan satu provinsi yang tidak mengalami penurunan volume usaha pada tahun 2010-2014 yaitu provinsi Sumatera Utara. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatannya. Namun berdasarkan tabel I.3 kegiatan usaha koperasi hampir di tiap provinsi tahun 2010-2014 menurun dilihat dari volume usahanya. Pada setiap akhir periode pembukuan, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak namun jika volume usaha koperasi terus menurun maka tujuan koperasi

semakin sulit untuk diwujudkan. Tujuan utama koperasi bukanlah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya seperti badan usaha lain namun bukan berarti koperasi tidak boleh mencari keuntungan. Koperasi justru harus mencari keuntungan agar kegiatan usahanya dapat terus berjalan namun keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang wajar karena tujuan utama koperasi di Indonesia bukanlah mencari keuntungan sebesar-besarnya melainkan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dapat terlihat bahwa koperasi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera mengalami permasalahan yang berkaitan dengan menurunnya jumlah anggota dan volume usaha sehingga menyebabkan berkurangnya sisa hasil usaha, dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sisa hasil usaha pada koperasi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam sisa hasil usaha sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha?
2. Apakah ada pengaruh modal usaha terhadap sisa hasil usaha?
3. Apakah ada pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha?
4. Apakah ada pengaruh jumlah anggota, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ternyata masalah sisa hasil usaha memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi dana dan waktu, maka peneliti membatasi masalah pada: Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha?
2. Apakah ada pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha?
3. Apakah ada pengaruh jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai jumlah anggota, volume usaha dan sisa hasil usaha pada koperasi sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan dalam pengembangan koperasi melalui peningkatan jumlah anggota, dan volume usaha guna meningkatkan sisa hasil usaha pada koperasi. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan jumlah anggota, volume usaha dan sisa hasil usaha pada koperasi, dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang koperasi.